



Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka Kebijakan Lingkungan ASEAN

Harisa Firdaus Pahlawan

Universitas Padjadjaran, Indonesia; harisa23001@mail.unpad.ac.id

| Dikirim: 30-06-2024 | Direvisi: 24-09-2024 | Diterima: 24-09-2024 | Dipublikasikan: 03-02-2025 |

Keywords

ASEAN; Economic Diplomacy; Indonesia; Sustainable Development

ABSTRACT

This research aims to analyze Indonesia's economic diplomacy within the framework of ASEAN environmental policy through the concepts of foreign policy, diplomacy, and sustainable development. Indonesia foreign policy shows effort to align their economic interests with ASEAN commitments in responding to environmental issues and sustainable development. As the largest economy in ASEAN, Indonesia play significant role in developing environmental policies that support sustainable development goals. Indonesia's economic diplomacy not only enhances its economic reputation and competitiveness, but also reflects ASEAN's regional integration and economic stability. This research used a descriptive qualitative approach to analysis and obtaining data through literature studies, by utilizing book literature, journals, government documents, news, and official state portals. Miles and Huberman models are used as data validation techniques utilizing data obtained through literature studies by conducting data reduction, presentation, and verification procedures. The results showed that Indonesia has various economic interests in ASEAN, Indonesia's strategy in aligning economic diplomacy with ASEAN environmental policies includes active participation in multilateral and bilateral cooperation of ASEAN members, and promotion of green investment in both the green economy and blue economy. This approach allows Indonesia to support renewable energy initiatives, and build sustainable infrastructure.

Kata Kunci

ASEAN; Diplomasi Ekonomi; Indonesia; Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia dalam kerangka kebijakan lingkungan ASEAN melalui konsep kebijakan luar negeri, diplomasi, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui kebijakan luar negerinya, Indonesia berupaya untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan komitmen ASEAN dalam merespon isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peran signifikan dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia sejatinya tidak hanya meningkatkan

reputasi dan daya saing ekonominya, tetapi juga mencerminkan integrasi regional dan stabilitas ekonomi ASEAN. Metode riset yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dengan memperoleh data melalui studi pustaka, yakni memanfaatkan literatur buku, jurnal, dokumen pemerintah, berita, dan portal resmi negara. Teknik validasi data menggunakan model Miles dan Huberman, memanfaatkan data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan melakukan prosedur reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia memiliki berbagai kepentingan ekonomi di ASEAN, Strategi Indonesia dalam menyelaraskan diplomasi ekonomi dengan kebijakan lingkungan ASEAN mencakup partisipasi aktif dalam kerjasama multilateral dan bilateral anggota ASEAN, dan promosi investasi hijau baik ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk mendukung inisiatif energi terbarukan, dan membangun infrastruktur berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Diplomasi telah mengalami perluasan ruang kajian dalam mencapai kepentingan nasionalnya, salah satunya memasukan faktor ekonomi ke dalam objek pencapaian ketika berhubungan dengan negara lain. Diplomasi ekonomi diarahkan oleh negara tidak hanya terbatas kepada hubungan bilateral, juga berusaha mewujudkan situasi perdagangan yang menguntungkan dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu regional melalui integrasi ekonomi regional. Indonesia pada halnya optimis memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk mempromosikan dan meningkatkan daya saing terhadap mitra ekonomi baik di tingkat regional dan global, di mana Indonesia sejatinya memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah meliputi logam, tambang, hutan, laut, dan demografi terbesar ke-4 di dunia. (Khairally, 2023) Indonesia pun menjadi bagian penting dari anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), menyumbang perekonomian Asia Tenggara melalui produk domestik bruto (PDB) sebesar US\$1,4 triliun atau 36,7% dari total PDB ASEAN tahun 2023 (Ahdiat, 2023).

Sebagai salah satu negara ASEAN dengan ekonomi terbesar, Indonesia sangat membutuhkan bantuan transisi untuk menciptakan kerangka kerja kebijakan pembangunan berkelanjutan secara ekologis yang mendukung dan sejalan dengan tujuan ASEAN pada tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Berkelanjutan diinisiasi oleh PBB. Penargetan negara-negara, juga Indonesia untuk mulai melakukan pengetatan kebijakan pembangunan berkelanjutan tidak lain dipengaruhi oleh desakan isu-isu lingkungan telah mengancam eksistensi umat manusia. Khususnya di Asia, lokasi geografis dan astronomis mendukung produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan sektor-sektor vital kehidupan mulai melemah akibat aktivitas industri, Efek Rumah Kaca (ERK), mengakibatkan perubahan iklim ekstrem dan meningkatkan suhu bumi berpengaruh pada seluruh sektor penting di atas (Soo-Chen & McCoy, 2022).

Indonesia mendapatkan banyak keuntungan dari peluang dan dukungan yang ditawarkan oleh para anggota ASEAN. Ketika dihadapkan pada ancaman lingkungan di masa depan, ASEAN sebagai sebuah kawasan telah bereaksi dengan tegas untuk meningkatkan kerja sama dan integrasi negara anggota dalam menghadapi tantangan lingkungan. Adanya Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Lingkungan Hidup (AMME) dan Pejabat Senior ASEAN untuk Lingkungan Hidup (ASOEN) telah menyelenggarakan konferensi lingkungan hidup (The ASEAN Secretariat, 2024). Kerangka kebijakan lingkungan ASEAN sangat mendukung upaya Indonesia untuk mencapai keberlanjutan ekonomi di masa depan karena menyatakan bahwa isu-isu penting seperti perlindungan

keanekaragaman hayati, menekankan upaya memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, dan menyediakan preventif mengenai permasalahan iklim dan cuaca merupakan agenda penting, sebagaimana dinyatakan dalam Visi ASEAN 2025. Setidaknya, pandangan lingkungan yang sama dari negara-negara ASEAN telah memberikan dampak yang menguntungkan bagi Indonesia. (ASEAN, 2016) Sehingga, pada utamanya prospek kerangka kebijakan lingkungan ASEAN pada kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia memberikan dorongan seperti kebijakan lingkungan yang disepakati anggota ASEAN dapat melindungi aset kepentingan nasional meliputi sumber daya alam laut, darat, dan udara, lalu integrasi kebijakan lingkungan Indonesia melalui kerangka kebijakan lingkungan ASEAN dapat mendukung daya saing dan menarik minat investasi untuk hadir di pasar regional bahkan global, serta adanya ketertarikan Indonesia di ASEAN, terutama di bidang lingkungan akan sangat mempengaruhi eksistensi Indonesia di ASEAN sebagai *'role model'* bagi negara-negara ASEAN kepada dunia internasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023).

Melalui latar belakang di atas terdapat identifikasi masalah yang dapat disoroti pada penulisan artikel, bahwa keberlangsungan lingkungan menjadi standarisasi yang mulai diberlakukan baik organisasi internasional dan negara-negara sebagai bagian dari norma dan aturan internasional. secara perlahan Indonesia memastikan harus dapat berupaya mengadaptasikan aktivitas dan kebijakan ekonomi melalui diplomasi ekonomi yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, atau ekonomi berkelanjutan. Adapun pertanyaan yang disoroti pada artikel ini meliputi:

1. Bagaimana strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam mempromosikan praktek-praktek ekonomi berkelanjutan di ASEAN?
2. Tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan diplomasi ekonomi dengan kebijakan lingkungan ASEAN?

Adapun pada bagian akhir paragraf ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu meliputi jurnal yang memiliki keterkaitan topik penelitian sampai dengan data yang disampaikan berupa hasil riset terdahulu dalam mendukung argumentasi dan data yang disampaikan selama penelitian berlangsung. Pada (Wu et al., 2023) penelitian ini membahas tentang diplomasi ekonomi melalui implementasi Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia di negaranya. Penelitian ini menggambarkan Indonesia berambisi mencapai pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan maritim dan mengkaji prospek kebijakan Poros Maritim Dunia dari 2019 hingga 2023. Di mana *Blue Economy* bagian dari rencana kebijakan Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pada (Hendar et al., 2022) penelitian ini menjelaskan upaya Indonesia dalam mengatasi polusi plastik di laut melalui diplomasi lingkungan ASEAN. Di mana Indonesia aktif melalui diplomasi lingkungan di tingkat regional dan global untuk mengatasi masalah lingkungan, termasuk sampah plastik di laut. ASEAN juga pada pasalnya telah menyusun kerangka aksi dan rencana aksi regional untuk mengurangi jumlah kubik sampah laut di kawasan perairan ASEAN. Bersamaan dengan implementasi kerja sama bilateral untuk Memerangi Sampah Plastik Laut, ASEAN tahun 2021 mengeluarkan program penanganan sampah bersama sebagai bentuk respon untuk mengatasi masalah sampah plastik laut di negara-negara anggota ASEAN. Pada (Siswiyanti, 2023) penelitian ini membahas tentang langkah Indonesia dalam mengatasi polusi plastik, termasuk melalui kebijakan nasional dan kerjasama di tingkat ASEAN. Di mana Indonesia melakukan meliputi pemantauan sampah laut, rehabilitasi terumbu karang, dan konferensi tentang sampah plastik laut. Indonesia juga menyadari bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor dalam menjaga stabilitas keamanan di ASEAN. Pada (Muhammad Afif Fadhli Az Zamzami & Nur Azizah, 2024) penelitian ini membahas tentang kebijakan diplomasi Indonesia terhadap negara-negara di Afrika dalam tujuan kerja sama ekonomi. Di mana *Indonesia-Africa Forum* (IAF) menjadi jalan dalam membangun kerja

sama strategi di bidang investasi dan ekonomi, serta mempromosikan aspek lingkungan dalam implementasi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara afrika.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dimanfaatkan oleh sebagian negara-negara menjadi strategi dalam memperoleh tujuan kepentingan nasional, tidak sedikit membutuhkan proses dan pertimbangan elit politik agar dapat menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri optimal. KJ Holsti, memaparkan konsep kebijakan luar negeri bagian dari tindakan atau manuver dengan bertujuan menjadi solusi bagi negara dalam menyelesaikan masalah dan membentuk sebuah hasil yang diharapkan negara (Holsti, 1983). Negara memanfaatkan kebijakan luar negeri untuk merepresentasikan posisi, dan tujuan pada suatu urgensi baik merespon bentuk ancaman dan kerja sama yang diperoleh dari adanya interaksi antar negara dalam struktur internasional. James N. Rosenau, menggambarkan kebijakan luar negeri bagian aktivitas negara untuk memperoleh kepentingan nasionalnya baik dengan memanfaatkan faktor internal dan eksternal (Delanova, Mariane, 2017). Bentuk eksternal yang dihadapi dapat berupa faktor yang berhubungan dengan ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, serta keberadaannya mempengaruhi persepsi elit.

Menurut Kegley dan Wittkopf, kebijakan luar negeri adalah bentuk komponen yang mencerminkan tindakan pemerintah, adanya perumusan kebijakan luar negeri dimaksudkan untuk menggabungkan kepentingan nasional dan tujuan dalam bereaksi terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa di luar negeri. Tujuan-tujuan ini juga dikejar melalui penggunaan cita-cita dan instrumen. (Jr & Wittkopf, 2001) Henry Kissinger memaparkan arti dari kebijakan luar negeri yakni reaksi negara untuk memposisikan pada masalah tersebut. (Wijayanti, 2022) Kissinger menggambarkan persepsi negara terhadap suatu fenomena dengan menggunakan kebijakan luar negeri, respon negara dapat diamati oleh negara lain melalui bagaimana kebijakan luar negeri menilai suatu isu tersebut. Seperti isu lingkungan bagi ekonomi mulai menjadi konsentrasi penting, karena berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia.

Perumusan kebijakan luar negeri kembali kepada pertimbangan elit politik yang melihat peluang dari lingkungan eksternal dan kepentingan internal. (A. Putri, 2020) James A. F. Stoner menjabarkan pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri memperhatikan aspek-aspek berikut: (1) memiliki pilihan berdasarkan logika atau pertimbangan; (2) Elit politik memiliki tujuan yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kepentingan nasional, lalu mempertimbangkan cara yang tepat dalam mewujudkan hal tersebut; (3) Memiliki pilihan yang menurut elit politik dapat menghasilkan hasil yang paling menguntungkan bagi negara. (Rosenau et al., 1976) menurut Rosenau dijelaskan pertimbangan negara untuk mengambil kebijakan luar negeri bergantung kepada beberapa faktor yakni meliputi:

1. Kebijakan luar negeri termanifestasi sebagai perilaku atau aktivitas yang menggambarkan keputusan dibuat oleh para pengambil keputusan dalam menanggapi kondisi dan peristiwa di dunia internasional. Baik komitmen atau tujuan yang lebih terfokus maupun orientasi yang lebih luas menjadi tolok ukur kepentingan nasional suatu negara;
2. Kebijakan luar negeri berfungsi sebagai panduan bagi para pengambil keputusan tentang bagaimana merespons keadaan eksternal yang berbeda berdasarkan pandangan, sikap, dan cita-cita suatu negara dalam menentukan posisinya dalam urusan internasional;
3. Kebijakan luar negeri yakni alat yang digunakan para pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan mereka dan mengatasi peluang dan tantangan yang muncul dari negara lain.

Konsep *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan)

Sustainable Development menjadi konsep yang ditekankan negara-negara dalam menjalin hubungan diplomasi. Berkembangnya pembangunan berkelanjutan mengingat dampak aktivitas manusia di bidang industri, perdagangan, pengembangan teknologi, dan sebagainya mempengaruhi perubahan iklim, perubahan struktur lahan dan alam, serta meningkatkan temperatur bumi atau disebut *global warming*. The Brundland Commision mereorientasikan *sustainable development* dengan memperhatikan aspek keberlangsungan jangka panjang bagi generasi di masa depan, hal tersebut meminimalisir dampak negatif melalui pemanfaatan arif teknologi dari eksploitasi alam dan bentuk interaksi ekonomi yang dilakukan negara-negara. (Keeble, 1987) Adanya perluasan makna ekonomi pada pembangunan berkelanjutan atau disebut ekonomi berkelanjutan, tidak terlepas dari penekanan bahwa ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan pelestarian lingkungan. (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2023)

Dalam upaya untuk memenuhi tuntutan sosial dan lingkungan dari generasi mendatang sekaligus meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan dari generasi saat ini, masyarakat dan negara memasukkan upaya keberlanjutan ke dalam setiap kebijakannya. Hart menekankan bahwa lingkungan dapat mendukung keberlangsungan hidup manusia dengan cara hidup berdampingan dengan alam. (Hart et al., 2003) Perkembangan teknologi yang diusung negara-negara maju seperti saat ini sudah pasti dapat mendukung kapasitas ekonomi dan meminimalisir kerusakan alam yang dihasilkan dari eksploitasi *non-renewable resources*. Terlebih, dunia internasional melalui forum pertemuan tingkat negara telah mengajak untuk mulai beralih kepada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. (Tuzmukhamedov, 2021). *Sustainable Development Goals* atau Sdgs menyematkan tujuan global untuk bersama-sama membangun berkelanjutan melalui poin penting meliputi **(1) Menekan Angka Kemiskinan (2) Menekan fenomena Stunting atau Kelaparan; (3) Terjaminnya Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat; (4) Membangun Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Pemerataan Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Transisi Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Tersedianya Lapangan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial; (11) Tempat Tinggal dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Respon Terhadap Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kerja Sama Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Stabilitas Ekonomi** (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2024)

Keberlangsungan *Sustainable Development* oleh suatu negara setidaknya sangat bergantung kepada tolok ukur, meliputi tujuan dari pembangunan berkelanjutan, bentuk implementasi dari pembangunan berkelanjutan, cara dan strategi dalam menyeimbangkan konsep pembangunan lingkungan dan ekonomi, dan target waktu dalam mewujudkan konsep pembangunan lingkungan dan ekonomi secara keseluruhan. (Niken Pratiwi et al., 2018) Adanya tujuan dari hal tersebut untuk mengetahui perkembangan dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi negara. Bagi negara-negara ASEAN, konsep *Sustainable Development* berirama dengan agenda pembangunan berkelanjutan baik yang telah diratifikasi dalam poin Sdgs United Nation, dan kesepakatan bersama. ASEAN menekankan keberlanjutan dengan meningkatkan kualitas edukasi dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur dan mengadakan integrasi ekonomi sesuai dengan prinsip *Sustainable Development* dalam rangka menekan angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. (Kingston, 2006)

Konsep Diplomasi Ekonomi

Konsep Diplomasi sampai detik ini masih menjadi mekanisme yang dimanfaatkan negara-negara internasional, diplomasi secara gamblang bagian dari strategi negara meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak lain di tingkat internasional. Diplomasi juga terlepas dari keterikatan hubungan bilateral dan multilateral, digunakan dalam memperoleh tujuan dan kepentingan nasional yang tidak semuanya dapat diakses secara mudah. Sehingga, diplomasi lebih dikenal sebagai seni piawai negosiasi untuk menarik perhatian negara lain. (Panikkar, 1956) Diplomasi oleh Pannikar bagian dari pendekatan atau langkah untuk melakukan interaksi dengan negara lain dalam memperoleh kepentingannya secara damai.

Sedangkan, Sir Earnest Satow memberikan pemahaman bahwa diplomasi sebagai bentuk resmi hubungan antara negara melalui kepiawaian strategi komunikasi dan negosiasi dalam mencapai kepentingan nasional. (Satow, Ernest, 1932) Hal tersebut selaras dengan yang dijelaskan oleh Barston menjelaskan diplomasi melibatkan interaksi aktor negara maupun non-negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya, menempatkan diplomasi bagian dari perpanjangan negara dalam mencapai kepentingannya di luar negeri (Barston, 2014) Diplomasi menjadikan eksistensi negara pada struktur internasional lebih dirasakan, keberadaan diplomasi dapat menjadi alternatif kondisi yang sebelumnya dalam memperoleh kepentingan atau menyelesaikan konflik cenderung melalui konflik terbuka.

Klasifikasi diplomasi oleh negara seiring berkembangnya waktu menyesuaikan dengan kepentingan negara mencapai tujuan nasionalnya. Seperti **Dollar diplomacy**: bertujuan untuk memberikan insentif atau bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan dalam segi ekonomi. **Diplomasi publik**: Diplomasi publik bagian strategi yang digunakan pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi masyarakat negara lain. **Diplomasi ekonomi**: diplomasi yang berhubungan dengan masalah ekonomi sebagai objek, alat perjuangan, kerja sama dalam hubungan internasional. **Diplomasi kapal perang**: diplomasi kapal perang melalui penunjukkan kekuatan militer dalam rangka menimbulkan ancaman untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. **Politik pasifikasi**: diplomasi ini memunculkan pasifikasi atau keengganan untuk memperburuk atau menghasut kontradiksi yang ada di antara negara-negara. **Diplomasi digital**: diplomasi dengan memanfaatkan akses teknologi seperti internet, informasi, untuk memecahkan masalah diplomatik. **Diplomasi rakyat**: Diplomasi rakyat bertujuan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi negara lain melalui serangkaian komunikasi, pengetahuan timbal balik, dan pengenalan budaya dan identitas kepada publik. (Lenshie & Mohammed, 2023)

Dalam hal menegosiasikan isu-isu yang berkaitan dengan tenaga kerja, investasi, pertukaran produk dan jasa, serta kegiatan manufaktur, diplomasi ekonomi berfungsi sebagai alat diplomasi. (Della & Solihat, 2022) Diplomasi ekonomi dalam sistem internasional adalah alat yang digunakan oleh negara-negara untuk berkolaborasi atau berkompetisi. Adanya penawaran bantuan pembangunan, hibah, investasi, dan sebagainya menjadi alat bagi negara saat melakukan proses banding atau menekan pihak yang ingin dikuasai melalui jalur *soft power*. (Killian, 2012) Diplomasi ekonomi secara gamblang memiliki pendekatan lain seperti *Economic Diplomacy*, *Commercial Diplomacy*, *Trade Diplomacy*, *Financial Diplomacy*, di mana secara keseluruhan mendukung pembuatan kebijakan perdagangan, fasilitas negosiasi, dan mencapai kepentingan ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (Irawan & Kertasasmita, 2015)

Output dari diplomasi ekonomi tidak lain bagi negara adalah (1) mendapatkan keuntungan dan kemudahan dalam melakukan interaksi perdagangan dengan negara mitra baik melalui perjanjian dagang, konsorsium antara kedua negara, dan menghilangkan hambatan ekspor dan impor; (2) mendukung masuknya investasi asing yang dapat membantu dalam membangun infrastruktur dan lapangan pekerja; (3) berupaya mendapatkan suntikan dana berupa *Foreign Direct Investment* (FDI) dan hibah dalam mendukung proses kebijakan nasional yang ditujukan untuk mensejahterakan

masyarakat; (4) meningkatkan potensi industri produk dalam negeri dan menguatkan daya beli masyarakat melalui penguatan nilai rupiah terhadap pasar. (Sabaruddin, 2019)

METODE RISET

Metode penelitian menggunakan model kualitatif deskriptif analisis dengan memanfaatkan sumber data yang diperoleh dari pengambilan data studi literatur meliputi buku, jurnal, dokumen pemerintah, berita, dan portal resmi negara (Creswell, 2009). Kualitatif berupaya menganalisis fenomena masalah dengan melalui serangkaian riset meliputi perolehan studi kasus, pengumpulan data, penulisan analisis data yang disampaikan dengan narasi, sampai dengan pengambilan kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah. Teknik validasi data menggunakan model Miles dan Huberman (1994), dengan memperoleh reduksi data yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi Indonesia dan kebijakan lingkungan ASEAN, lalu penyajian data yang sesuai setelah melakukan reduksi data dengan menyampaikan narasi analisis, dan verifikasi data menggunakan perbandingan data yang telah dikumpulkan saat studi pustaka agar dapat menghasilkan informasi akurat dan menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Lingkungan Asean

Berdirinya ASEAN merupakan bagian dari implementasi kepentingan negara-negara di Asia Tenggara, melalui organisasi regional tersebut memperkuat keberhasilan dari tujuan negara-negara agar dapat menciptakan stabilitas baik di bidang politik dan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial dan budaya serta ekonomi. Namun, seiring berkembangnya zaman desakan dunia internasional terhadap ancaman lingkungan memberikan mandat baru bagi ASEAN untuk meminimalisir minimal dari dampak perubahan ekstrem alam yang dirasakan oleh negara-negara anggotanya. Perkembangan kebijakan luar bidang lingkungan sekitar anggota ASEAN telah mulai dibentuk dan digaungkan melalui pertemuan ASCC seperti mendesak anggota ASEAN untuk mulai memperbaharui kebijakan luar negerinya dengan memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan, ASCC juga menekankan kepada koordinasi bersama dalam mengurangi angka deforestasi ilegal, polusi udara, dan kejahatan lintas batas negara seperti *illegal logging*, pukat harimau, dan sebagainya (Yuniarti, 2012).

Kebijakan lingkungan di ASEAN pada dasarnya menghimbau negara-negara anggota untuk mulai menyadari bahwa ancaman lingkungan dapat membahayakan stabilitas negara-negara anggotanya. ASEAN turut mendorong mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk menangani masalah-masalah lingkungan, seperti *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* bertujuan untuk mengadakan dekarbonisasi dengan mengurangi sumber bahan bakar tidak ramah lingkungan, *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation* bertujuan untuk menguatkan transisi teknologi bersih dan terbarukan, dan *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint* dengan output mengintegrasikan kerja sama ekonomi ASEAN dibawah payung kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan (ASEAN Secretariat, 2009).

Adapun Kebijakan lingkungan di ASEAN dalam konteks ekonomi, berupaya mewujudkan Diplomasi Ekonomi Regional dengan menerapkan prinsip *eco-green* dan keberlanjutan, di mana hal tersebut terlihat dari ratifikasi kebijakan lingkungan dalam upaya harmonisasi regulasi di antara anggota ASEAN untuk menghasilkan memfasilitasi perdagangan dan investasi berkelanjutan. Serta mendorong negara-negara untuk menyesuaikan undang-undang lingkungan nasionalnya dengan standar regional seperti tertera pada kebijakan dan program ASEAN. Pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan ASEAN sudah mulai berlangsung dan diterapkan anggota seperti ASEAN mendorong transisi menuju ekonomi hijau dengan mempromosikan investasi hijau melalui

pendekatan diplomasi multilateral seperti percepatan energi bersih terbarukan dan diplomasi ekonomi berkelanjutan oleh anggota ASEAN terhadap negara-negara mitra untuk memperhatikan kondisi lingkungan sebagai standar bisnis. (International Organisation Labor & The ASEAN Secretariat, 2021) Kebijakan lingkungan di ASEAN di bidang ekonomi juga berupaya meningkatkan daya saing ekonomi negara anggota, dan mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya alam dengan adaptasi kebijakan green economy yang dicanangkan pada berbagai komitmen multilateral (Anwar, 2022).

Kebijakan lingkungan di ASEAN juga mendorong Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai komitmen kebijakan lingkungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum dan rambu-rambu bagi kebijakan luar negeri dalam mengurus permasalahan lingkungan di dalam negeri (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2009 telah berupaya menekan tindakan pencemaran lingkungan meliputi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tindakan penebangan ilegal dan menggiatkan reboisasi terhadap lahan yang telah terdampak akibat aktivitas pertambangan, memperketat pengawasan dan penegakan hukum bagi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mulai diterapkan kepada permasalahan investasi ekonomi di bidang industri, eksploitasi sumber daya alam, dan konservasi perlindungan satwa dan tumbuhan (Dermina Dalimunthe, 2021).

Diplomasi Ekonomi Indonesia di ASEAN

Peluncuran diplomasi ekonomi oleh Indonesia terhadap negara anggota ASEAN tidak dilakukan tanpa persiapan matang. Melalui 4 pilar fokus kebijakan luar negeri Indonesia telah tertuang kepentingan Indonesia di bidang ekonomi, melalui diplomasi ekonomi dengan menguatkan infrastruktur dan kapasitas perdagangan dan bisnis domestik bertujuan menarik minat investasi serta menjadikan Indonesia sebagai episentrum perdagangan global di ASEAN. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019) Kepentingan dan prioritas diplomasi ekonomi Indonesia melalui ASEAN tidak lain dipengaruhi oleh beberapa faktor penting: (1) Pasar Ekspor dan Investasi menjadi fokus utama Indonesia melebarkan sayapnya di ASEAN, di mana Indonesia melalui Perjanjian perdagangan bebas ASEAN (AFTA), *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA), *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), dan sebagainya untuk menguatkan ekspor produsen produk dalam negeri. Contohnya ACFTA, memfasilitasi aliran barang yang dijual oleh Indonesia tanpa harus terkena biaya tambahan, meningkatkan nilai dan pengetahuan produk Indonesia, serta membuka pasar baru bagi Indonesia di negara-negara ASEAN, termasuk China yang tergabung pada perjanjian dagang ini (Khaldun, 2022); (2) Penguatan Posisi Negosiasi dalam Forum Internasional, melalui ASEAN Indonesia dapat menjadi role model bagi perdagangan global yang tertarik melakukan hubungan dagang dengan negara anggota. ASEAN dikenal memiliki jumlah negara yang dipercaya investor seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan sebagainya.

Adanya perjanjian dagang seperti ini dapat meningkatkan eksistensi ekonomi Indonesia di tengah negara-negara mitra tersebut; (3) Stabilitas Ekonomi Regional, Indonesia berupaya menjadikan ASEAN sebagai pasar strategi global dengan alasan geografis ASEAN dilewati jalur pelayaran internasional (Liwe, 2018); (4) Percepatan Infrastruktur, Transfer Teknologi, dan Konektivitas. Indonesia melalui diplomasi ekonomi berupaya mengedepankan percepatan ketiga aspek tersebut dengan memanfaatkan ASEAN Connectivity. Adanya negara-negara anggota dapat membantu percepatan Indonesia dalam menguatkan ekonomi nasionalnya (Aritenang, 2017); (5) integrasi ekonomi ASEAN, dengan menyatukan potensi ekonomi Indonesia ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN di mana melalui tujuan tersebut berupaya menjadikan Indonesia sebagai episentrum ekonomi global di Asia Tenggara.

Fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama di ASEAN dan memiliki pengaruh yang cukup besar memberikan kepercayaan diri dalam hal diplomasi ekonomi. Diperkirakan Indonesia akan memiliki PDB sekitar \$1,2 triliun pada tahun 2023, melampaui PDB gabungan dari semua negara ASEAN (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019). Selain itu, peluang yang dimiliki Indonesia sebagai episentrum ASEAN mulai dari jumlah penduduk dan usia produktif cukup memadai sebagai tenaga kerja, potensi alam dan wilayah produktif yang dapat dimanfaatkan oleh investor asing, pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia memiliki keanekaragaman seperti di bidang pertanian, perikanan, pertambangan, yang merupakan hasil kekayaan alam melimpah dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai daya tarik investor dan negara-negara mitra (Saptati, 2023).

Strategi dan pendekatan Indonesia dalam diplomasi ekonomi berkelanjutan di ASEAN

Manuver Indonesia dalam meluncurkan diplomasi ekonomi berkelanjutan menjadi analisis yang diusung dengan mengedepankan prinsip diplomasi yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Komitmen Indonesia sudah terlihat jelas dengan adanya ratifikasi dan adaptasi kebijakan lingkungan sedang dilakukan agar dapat mewujudkan kawasan ASEAN sekaligus Indonesia mendapatkan kepercayaan internasional. di mana strategi diplomasi ekonomi Indonesia menitikberatkan kepada langkah penting berikut:

- (1) Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru: Indonesia mulai mengedepankan kedua prinsip di atas dengan mengatasmakan kepentingan global. Di mana prinsip berbasis lingkungan mulai diterapkan dalam aktivitas ekonomi, seperti mengadopsi teknologi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan minyak fosil dan beralih kepada energi terbarukan, menerapkan pengelolaan energi berkelanjutan di mana ekosistem biota laut dan hutan dipastikan harus tetap utuh sesuai yang ditekankan oleh Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2009. Baik Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, dapat menarik simpati dan dukungan negara-negara anggota agar bisa mendorong langkah diplomasi ekonomi menghasilkan bagi ekonomi Indonesia;
- (2) Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: keterlibatan Indonesia dalam *ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum* menekankan bahwa Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan ramah investasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan, dan mendorong percepatan teknologi ramah lingkungan mulai dari kendaraan, industri, dan sebagainya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2016);
- (3) Transisi Energi Terbarukan, melalui *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation* (APAEC) Indonesia berupaya berkontribusi dalam menggunakan energi bersih terbarukan dalam berbagai bidang ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. seperti mulai mengembangkan investasi pembangkit listrik tenaga alternatif, dekarbonisasi menuju Indonesia *zero carbon*, dan berupaya mengajak dunia internasional untuk berinvestasi pembangunan berkelanjutan di ASEAN dalam rangka membantu percepatan transisi lingkungan bagi Indonesia dan ASEAN (ASEAN Centre for Energy (ACE), 2021);
- (4) Memprioritaskan perdagangan berkelanjutan: Indonesia mendorong terbentuknya sertifikasi ramah lingkungan untuk memperluas pasar ekspor di ASEAN. Di mana hal tersebut dalam upaya mencapai kepercayaan negara internasional untuk menanam investasi dan mencapai target mekanisme perdagangan karbon (D. Putri et al., 2015);
- (5) Pengembangan inovasi dan penelitian: diplomasi ekonomi Indonesia mengajak negara anggota ASEAN untuk melakukan investasi bersama dalam pengembangan teknologi terbarukan dalam upaya meningkatkan diversifikasi berbasis lingkungan.

Tantangan dan Peluang diplomasi ekonomi Indonesia dengan kebijakan lingkungan ASEAN

Keberlangsungan diplomasi ekonomi Indonesia jika dikaitkan dengan kebijakan lingkungan ASEAN sampai detik ini masih terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan secara cepat. Mengingat, pasalnya ASEAN memiliki poin penting yakni “*Non-interference in the internal affairs of one another*” pada pilar ASEAN (Molthof, 2012). Hal tersebut menekankan kepada tantangan dan peluang diplomasi ekonomi yang dihadapi Indonesia jika berkaitan dengan kebijakan lingkungan ASEAN.

Tantangan

Segi tantangan yang dimiliki oleh Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam melirik komitmen kebijakan lingkungan global dan kebijakan politik dari negara anggota ASEAN, setidaknya terdapat hal penting yang dapat ditemukan. Seperti adanya perbedaan prioritas ekonomi dan lingkungan, di mana pada umumnya masing-masing negara ASEAN memiliki standar tolok ukur yang diterapkan oleh mereka di bidang ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kepentingan nasional yang berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi dengan masih memanfaatkan cara tradisional, dikarenakan ketidakmampuan ekonomi untuk membiayai operasional transisi energi yang relatif masih mahal; Lalu munculnya persepsi di antara negara anggota berkembang ASEAN yakni pemikiran *Economic Growth vs. Environmental Protection*, di mana muncul kecenderungan negara ASEAN, terlebih mayoritas negaranya anggotanya masih berstatus negara berkembang dan masih berfokus, serta bergantung kepada pencapaian ekonomi tradisional yang dianggap dapat memaksimalkan potensi dalam negeri. Di mana hal tersebut, kembali memunculkan kontroversi pada kebijakan lingkungan seperti pemanfaatan energi tidak ramah lingkungan oleh aktivitas industri negara-negara berkembang di ASEAN. Selanjutnya, Efektivitas kerja sama dan program yang dianggap masih tidak dapat mengikat atau terpaku dari adanya prinsip *non-intervention*. Dan munculnya dilema dan *Trade-offs* yang ditemui negara ASEAN, terutama Indonesia yang jika terfokus kepada pengetatan kebijakan lingkungan dapat berpotensi mengurangi ketertarikan investasi asing untuk menyuntikan dana, terutama di bidang industri dan lapangan kerja. Pengembangan ekonomi di negara berkembang dengan biaya rendah masih ditekankan oleh negara-negara besar sebagai alasan atau hambatan bagi ASEAN untuk melakukan percepatan di bidang lingkungan.

Peluang

Segi peluang yang ditawarkan dari adanya Diplomasi Ekonomi Indonesia berkaitan dengan Kebijakan lingkungan ASEAN bagi negara anggota terutama Indonesia sendiri di mana adanya kebijakan ekonomi berbasis lingkungan memiliki kesempatan dapat menjadi sarana dalam mengembangkan *Green Economy* dan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan transisi energi terbarukan, pengadaan transportasi dan infrastruktur secara massal, dan menerapkan prinsip perdagangan hijau yang dapat meminimalisir dampak lingkungan dalam jangka panjang; Lalu peluang mendorong terjadinya teknologi dan inovasi dengan adanya investasi bersama di bidang pengembangan modernisasi dan penguatan energi bersih terbarukan sebagai dorongan dalam mendukung kebijakan luar negeri anggota ASEAN; Dan kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Kebijakan Lingkungan ASEAN, memiliki tempat dalam mengedepankan prinsip kerja sama berkelanjutan dan menjadikan ASEAN sebagai potensi *role model* dunia yang di mana Indonesia menjadi pusat episentrum ekonomi berkelanjutan di ASEAN.

KESIMPULAN

Diplomasi ekonomi Indonesia sejatinya menjadi instrumen penting bagi kepentingan ekonomi nasional Indonesia, di mana upaya Indonesia menyelaraskan kebijakan di bidang ekonomi melalui aspek-aspek lingkungan telah disepakati bersama negara anggota ASEAN, menjadi manuver penting memposisikan Indonesia di masa mendatang. Dengan adanya keberlangsungan kesadaran pembangunan berkelanjutan di lingkup ASEAN, manuver Indonesia yang dimaksud adalah Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, juga sekaligus mendatangkan kebermanfaatan dalam mendatangkan pembaharuan nasional. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya Indonesia memanfaatkan pembangunan berkelanjutan demi kepentingan nasionalnya meliputi pengembangan energi terbarukan, kebijakan perdagangan, dan investasi di bidang teknologi terbarukan. Melalui kontribusi dan keterlibatan Indonesia pada kebijakan lingkungan ASEAN diyakini dapat mempercepat langkah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih membutuhkan waktu lama dalam menyamakan kepentingan dan menyerap maksud tujuan dari strategi lingkungan yang telah dicanangkan bersama, terlebih Indonesia sebagai representasi utama ASEAN justru masih dihadapi masalah klasik yakni pengambilan kebijakan ekonomi yang cenderung masih bergantung kepada energi non-terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2023). *Ekonomi Indonesia Terbesar di ASEAN pada 2023*. Data Boks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/ekonomi-indonesia-terbesar-di-asean-pada-2023>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Aritenang, A. (2017). The Potential Development Effect of ASEAN Connectivity: The Case of Riau Corridor. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 33(2), 339.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i2.2590>
- ASEAN Centre for Energy (ACE). (2021). ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025. Phase II: 2021-2025. *The ASEAN Centre for Energy*, 1+67.
- ASEAN, D. J. K. S. (2016). *Asean 2025: Melangkah Maju Bersama*. 4(1), 1–23.
- ASEAN Secretariat. (2009). ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/5187-19.pdf>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2016). *MEMACU PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI ASEAN G2B INFRASTRUCTURE INVESTMENT FORUM*.
<https://www.bappenas.go.id/files/245863b5-6704-4bb2-a3a4-011cba7ebf7c/download>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2024). *SDGs KNOWLEDGE HUB Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Sdgs Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019-2023*.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/13/9f14d43dc0c01b6d1883fb7c/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2019-2023.html>
- Barston, P. R. (2014). *Modern Diplomacy* (Fourth). Routledge.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Sage.
- Delanova, Mariane, O. (2017). POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO MELALUI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI. *Dinamika Global*, 2(2), 51–66.
[https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/download/40/27/#:~:text=Menurut James N. Rosenau%2C kebijakan,N. Rosenau%2C 1976\).](https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/download/40/27/#:~:text=Menurut James N. Rosenau%2C kebijakan,N. Rosenau%2C 1976).)
- Della, A., & Solihat, A. (2022). Indonesia and Turkey's Economic Diplomacy in Enhancing Economic Cooperation: IT-CEPA Case Study. *Budapest International Research and Critic Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 1–12. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5947>
- Dermina Dalimunthe, L. S. &. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Ilegal.

- Jurnal El-Thawalib*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i2.3486>
- Hart, S. L., Milstein, M. B., & Caggiano, J. (2003). Creating sustainable value. *Academy of Management Executive*, 17(2), 56–69. <https://doi.org/10.5465/ame.2003.10025194>
- Hendar, H., Rezasyah, T., & Sari, D. S. (2022). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 201. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40721>
- Holsti, K. . (1983). *International Politics: A Framework for Analysis*. Prentice-Hall.
- International Organisation Labor, & The ASEAN Secretariat. (2021). *Regional study on green jobs policy readiness in ASEAN : final report*. (Issue June).
- Irawan, & Kertasasmita, G. (2015). Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). *Penelitian Monodisipliner*, 1, 9.
- Jr, C. W. K., & Wittkopf, E. R. (2001). *World Politics: Trend, and Transformation* (Six). St. Martin's Press.
- Keeble, B. R. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. In *World Commission on Environment and Development*. <https://doi.org/10.1080/07488008808408783>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Keuntungan Kerja Sama Negara ASEAN di Bidang Ekonomi bagi Masyarakat Indonesia*. <https://asean2023.id/id/news/benefits-of-asean-member-states-cooperation-in-economic-sector-for-indonesian-people>
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2023). *Presiden Joko Widodo Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan*. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7399/presiden-joko-widodo-ajak-masyarakat-jaga-kelestarian-lingkungan>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *PENYAMPAIAN PRIORITAS POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2019-2024*. [https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvTWVkaWEIMjBCcmllZmluZyUyME1lbmx1JTlwUkkIMjAtJTlwUHJpb3JpdGFzJTlwUG9sdWdySUyMDIwMTklMjAtJTlwMjAyNC5wZGY=#:~:text=Dari%20paragraf%2Cterdapat%20beberapa,iv%20ikut%20melaksanakan](https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvTWVkaWEIMjBCcmllZmluZyUyME1lbmx1JTlwUkkIMjAtJTlwUHJpb3JpdGFzJTlwUG9sdWdySUyMDIwMTklMjAtJTlwMjAyNC5wZGY=#:~:text=Dari%20paragraf%20tersebut%2Cterdapat%20beberapa,iv%20ikut%20melaksanakan)
- Khairally, E. T. (2023). *Mengenal 7 Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia*. Detik Education. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7114865/mengenal-7-potensi-sumber-daya-alam-di-indonesia>
- Khalidun, R. I. (2022). Peran Penting Pemerintah Indonesia Untuk Memanfaatkan Kembali Kesempatan dalam ACFTA. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 160–170. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3596>
- Killian, P. M. E. (2012). Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Global & Strategis*, 6(2), 171–186. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgsd095c88cd12full.pdf>
- Kingston, J. (2006). Association of South-East Asian Nations. *Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture*, 31–32.
- Lenshie, N. E., & Mohammed, I. (2023). *PCS 105 : INTRODUCTION TO DIPLOMACY Conceptualization of Diplomacy*.
- Liwe, A. J. (2018). Makna strategis kajian wilayah asia tenggara dari sudut pandang hubungan internasional. *Jurnal VERITY : Hubungan Internasional*, 10(20), 87–92. <http://dx.doi.org/10.19166/verity.v10i20.1460>
- Miles, Matthew, B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. In *Sage Publication* (Second). Sage Publications.
- Molthof, M. (2012). *ASEAN and the Principle of Non-Interference Written by Mieke Molthof*. 1–7. <https://www.e-ir.info/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/>
- Muhammad Afif Fadhlil Az Zamzami, & Nur Azizah. (2024). Indonesia Strategy in Increasing Economic Cooperation in African Countries. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 13–22. <https://doi.org/10.30997/jsh.v15i1.12860>
- Niken Pratiwi, Santoso, D. budi, & Khusnul Ashar. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 1–13.

- Panikkar, K. M. (1956). *The Principle and Practice of Diplomacy* (First). Asia Publishing House.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2009*.
- Putri, A. (2020). *Potensi Sumber Daya Alam Lautan*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all>.
- Putri, D., Susilo, D., Yuniati, S., & Jember, K. (2015). Alasan Indonesia Melaksanakan Program Ekolabel (Indonesia's Reason for Ecolabelling Program Implementation). *Jurnal Sospol*, 2(April), 32–38. <https://core.ac.uk/download/pdf/297680987.pdf>
- Rosenau, J. N., Gavin, B., & Thompson, K. W. (1976). *World Politics: An Introduction*. The Free Press.
- Sabaruddin, S. S. (2019). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Diplomasi Ekonomi. *Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia*, 1–22.
- Saptati, R. (2023). *ASEAN Diyakini Jadi Pusat Pertumbuhan Dunia*. Media Keuangan.
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/asean-diyakini-jadi-pusat-pertumbuhan-dunia-ini-alasannya%0A>
- Satow, Ernest, S. (1932). *A GUIDE TO DIPLOMATIC PRACTICE* (Third). Longsman, Green and Co.
<https://dn790002.ca.archive.org/0/items/guidetodiplomati00satouoft/guidetodiplomati00satouoft.pdf>
- Siswiyanti, Y. (2023). Indonesia Memimpin Asean Merespon Krisis Lingkungan Global. *STANDAR: Better Standard Better Living*, 2(5), 1–6.
<http://majalah.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/STANDAR/article/view/169%0Ahttps://majalah.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/STANDAR/article/download/169/142>
- Soo-Chen, K., & McCoy, D. (2022). *Climate Change in South-East Asia: Where Are We and What Are We Bound For?* United Nation University.
<https://ourworld.unu.edu/en/climate-change-in-south-east-asia-where-are-we-and-what-are-we-bound-for>
- The ASEAN Secretariat. (2024). *Overview Of Enviromental*.
<https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/environment/>
- Tuzmukhamedov, B. (2021). CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION. In *United Nations Audiovisual Library of International Law*. https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cpdpsbttwd/cpdpsbttwd_e.pdf
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology : Journal of Government Studies*, 2(2), 70–95.
<https://doi.org/10.26618/kjgs.v2i2.9487>
- Wu, C. S., Pasaribu, R. G. E. J., Azzahra, J. E., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2023). Prospek Diplomasi Ekonomi Indonesia Melalui Poros Maritim Dunia Dalam Implementasi Asean Blue Economy. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 5(2), 133–148.
- Yuniarti, A. (2012). Strategi ASEAN Membangun Sense of Community. *Jurnal UPN Veteran Yogyakarta*, 16(2), 33.

BIOGRAFI

Harisa Firdaus Pahlawan, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, memiliki minat dan konsentrasi dalam permasalahan hubungan internasional di bidang diplomasi dan kebijakan luar negeri, ekonomi politik global, dan isu-isu kontemporer yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengenal hubungan internasional.